



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
2019**

**BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Guna mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah senantiasa ditujukan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024, yaitu “Menjadi Institusi Terdepan Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat secara Profesional dan Akuntabel Guna Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari dengan tercapainya efektivitas pelayanan pengadaan barang/jasa”.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* di lingkungan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah 2019 adalah merupakan perwujudan pertanggungjawaban yang jelas, terukur, *legitimate* dan berkesinambungan sebagai hasil kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, sumber keuangan yang memadai dan sarana prasarana yang dimiliki serta semangat kebersamaan dalam mendukung visi dan misi Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah, syukur alhamdulillah pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan dengan efektif dan capaian kinerja yang baik.

Capaian kinerja ini secara akuntabel dituangkan dalam LKjIP Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Perlu disadari bahwa apa yang telah kita lakukan ini masih belum sempurna. Melalui pelaporan kinerja kami berharap terlihat sasaran yang telah tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan. Sehingga kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang akan menjadi lebih baik.

Semarang, Januari 2020

KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PENGADAAN BARANG/JASA SETDA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



Ir. YUNI ASTUTI, MA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620621 198709 2 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	2
D. Gambaran Umum Organisasi .....	3
E. Permasalahan Utama .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
A. Perencanaan Strategis .....	9
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	15
B. Upaya yang telah dilakukan .....	18
C. Realisasi Anggaran .....	44
<b>Bab IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran dan Masukan .....	50
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
A. Perjanjian Kinerja	
B. Rencana Kerja Tahunan	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan Gubernur selaku Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta alat control dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran guna kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen

perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kinerja hasil kegiatan Tahun 2019.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 70).

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga sebagai alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi sumber untuk perbaikan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

#### D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pengadaan barang/jasa.

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
3. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bidang administrasi pengadaan barang/ jasa;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Susunan Kepegawaian :  
Susunan Kepegawaian Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- a) Berdasarkan Jabatan :

Tabel 1.1.  
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	-	-	1
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	-	1	3	9	26	39

Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	-	1	2	1	5	9
Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	-	1	3	-	7	11
Jumlah Total	1	3	8	10	38	60

b) Berdasarkan Pangkat/Golongan ruang :

Tabel 1.2.

Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Unit Kerja	Gol IV	Gol III	Gol II	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	1
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	6	30	3	39
Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	1	4	4	9
Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2	8	1	11
Jumlah Total	10	42	8	60

c) Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.3.

Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana /D-4	Sarjana Muda	SMA/ SMK/ STM	SMP /ST	Jumlah
Kepala Biro	-	1	-	-	-	1
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	-	11	25	-	3	39
Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	-	2	2	5	-	9
Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	1	3	4	2	1	11
Jumlah Total	1	17	31	7	4	60

d) Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.4.  
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Biro	-	1	1
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	31	8	39
Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	6	3	9
Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	10	1	11
Jumlah Total	47	13	60

## 2. Sarana dan Prasarana

Sementara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 1.5.  
Sarana dan Prasarana di Biro APBJ SETDA

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.Lemari Besi/Metal	5	Baik
2	Meubelair.Sice	1	Baik
3	Meubelair. Meja 1/2 Biro	5	Baik
4	Meubelair. Kursi Rapat	73	Baik
5	Alat Pendingin Lemari Es	1	Baik
6	Dispenser	5	Baik
7	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	Baik
10	Kursi Rapat Kerja Eselon II	20	Baik
11	Peralatan Personal Komputer	1	Baik
12	Almari Besi Kaca Sorong 2 Pintu	1	Baik
13	Pendingin Ruangan (AC)	33	Baik
14	Almari Besi Kaca Sorong 4 Pintu	1	Baik
15	Almari Besi 2 Pintu	1	Baik
16	Almari Kayu 2 Pintu	1	Baik
17	Filling Cabinet	1	Baik
18	Meja Informasi	1	Baik
19	Meja Computer	1	Baik
20	Kursi Putar Manager	1	Baik
21	Kursi Tunggu isi 3	1	Baik
22	Kursi Tunggu Isi 4	1	Baik
23	Kursi rapat	1	Baik
24	LED TV 32 Inch	1	Baik



25	Printer Laserjet	1	Baik
26	Komputer PC	10	Baik
27	All in one PC	28	Baik
28	Macbook Pro Apple	1	Baik
29	Laptop Acer	1	Baik
30	Laptop Lenovo 9220	1	Baik
31	Laptop HP Spectre X360 13-AP0055TU	6	Baik
32	Printer Brother	1	Baik
33	Proyektor	9	Baik
34	LED TV 52 Inch	1	Baik
35	Kursi Kerja Eselon III	1	Baik
36	Printer Epson	1	Baik
37	Personal Komputer Desktop HP	5	Baik
38	Meja Kantor	1	Baik
39	Almari Pakaian	1	Baik
40	Printer DeskJet EPSON L3110	10	Baik
41	Laptop ACER Z3-451/8	2	Baik
42	Kursi Staf	20	Baik
43	Meja Komputer Orbitrend	8	Baik
44	Printer HP Laserjet Pro MFP M28A	6	Baik
45	Printer DeskJet EPSON L6160	1	Baik
46	Mobil Toyota	1	Baik
47	Sepeda Motor	5	Baik
48	Kamera	1	Baik
49	TV LED Samsung Flat Smart TV 65 INCH [UA65RU7100]	2	Baik
50	Portable AUDIO	1	Baik
51	Uninterruptable Power Supply	10	Baik
52	External Hardisk	2	Baik
53	Meja rapat	1	Baik
54	Sofa tamu	3	Baik
55	Kursi tamu	3	Baik
56	Buffet Pendek	2	Baik
57	Penarikan Jaringan Backbone & penataan jaringan internet	1	Baik
58	Meja Komputer Orbitrend	1	Baik

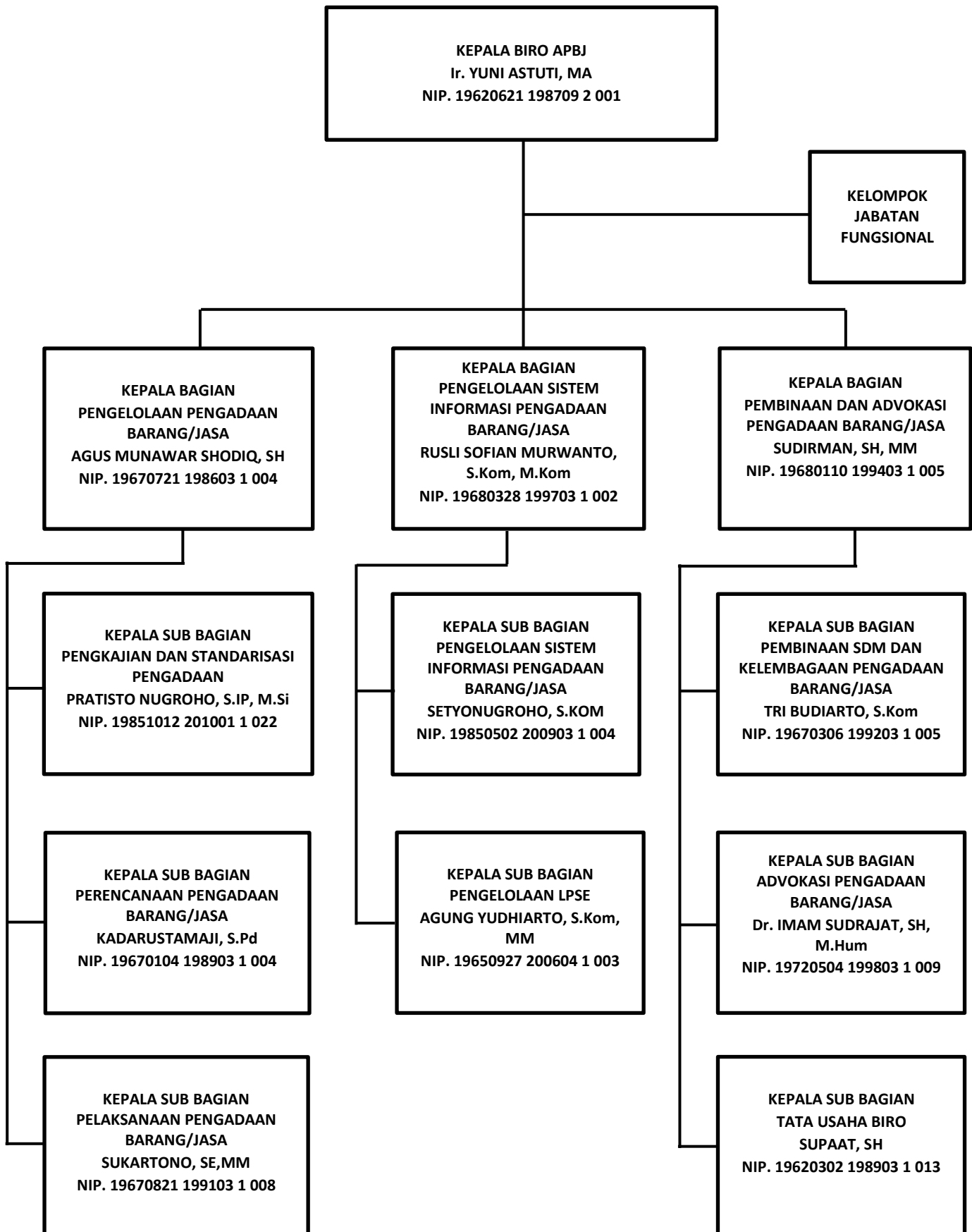
### 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

- a) Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional;
- c) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Pengkajian Dan Standarisasi Pengadaan;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - 3) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- d) Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - 2) Sub Bagian Pengelolaan LPSE.
- e) Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - 2) Sub Bagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Bagan 1.1.  
Struktur Organisasi Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

**STRUKTUR ORGANISASI  
BIRO APBJ SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



## **E. PERMASALAHAN UTAMA**

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna mewujudkan efektivitas pelayanan pengadaan barang/jasa. Berikut permasalahan utama (*strategic issued*) pada lingkup Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Tata kerja pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa belum optimal.
2. Modernisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) masih belum optimal.
3. Kapasitas SDM, pembinaan kelembagaan, dan advokasi pengadaan barang/jasa perlu ditingkatkan.
4. Rawan adanya gratifikasi (KKN) dalam proses pengadaan barang/jasa yang berakibat tidak selesainya pekerjaan atau berlanjut dalam proses hukum.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis/isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Dalam bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan (merupakan penjabaran Visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja kantor serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

### **BAB IV. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2019 - 2023.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan sasaran dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis (Renstra).

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan Unit Kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh Karena itu Renstra Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa menjadi satu kesatuan dalam Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) Tahun 2019 - 2023.

Dalam Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) telah ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2019 – 2023 yaitu:

“Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah”.

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka rumusan Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah,
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 merumuskan sejumlah program, yaitu:

Sasaran Pertama, Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah akan diwujudkan melalui dua program, yaitu: Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Sasaran Kedua, Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan diwujudkan melalui empat program, yaitu: Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Program

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah, Program Adminstrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sasaran Ketiga, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah akan diwujudkan melalui tiga program, yaitu: Program Pelayanan Umum, Keprotokolan dan Kehumasan; Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah; dan Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan sasaran nomor 2 (dua) yaitu Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan diwujudkan melalui 2 (dua) program, yaitu: Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pengadaan barang/jasa dengan sasarannya adalah meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Biro Administrasi Pengadaan barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan RENSTRA sebagai berikut :

Tabel 2.1.  
Rencana Kinerja Pelayanan Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Sasaran	
			2019	2020
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelengraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemilihan penyedia Katalog Elektronik Lokal pada 4 (empat) komoditas barang/jasa di lingkungan Provinsi Jawa Tengah	100%	100%
		Tercapainya standarisasi harga barang/jasa tahun 2021	-	100%
		Prosentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan	100%	100%
		Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	100%	100%
		Prosentase Efektivitas Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	70%	73%
		Prosentase Sistem Informasi	100%	100%

		Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa		
		Prosentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput data SISMONTEPRA sesuai kaedah	-	71%
		Prosentase Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Yang Berjalan Optimal	100%	100%
		Prosentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Yang Berjalan Sesuai SOP	100%	100%
		Prosentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan	100%	100%
		Optimalisasi Kinerja Tim Advokasi	100%	100%
		Implementasi Kode Etik, SOP Manajemen Risiko dan Dokumen Mitigasi Risiko	100%	100%
		Fasilitasi Pelaporan Korsupgah dan Stranas PK	100%	100%
		Sosialisasi dan Advokasi Kegiatan Konsolidasi PBJ serta Kode Etik	100%	100%
		Prosentase Penanganan Konsultasi, Aduan/Sangah/Sengketa dan Pendampingan Permasalahan Hukum (termasuk Sanksi Daftar Hitam) yang Difasilitasi	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum, dan pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa telah melakukan perjanjian kinerja dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran PK 2020 dan RKT 2021.

## B. RINGKASAN / IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

### 1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

#### a) Sub Bagian Pengkajian Dan Standarisasi Pengadaan.

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Subbag Pengkajian Dan Standarisasi Pengadaan

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan	Terlaksananya pemilihan penyedia Katalog Elektronik Lokal pada 4 (empat) komoditas barang/jasa di lingkungan Provinsi Jawa Tengah	100 %

#### b) Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tabel 2.3.

Indikator Kerja Subbag Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase Ketepatan Pemaketan dan Penjadwalan	100 %

#### c) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tabel 2.4.

Indikator Kerja Subbag Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	100 % dari jumlah paket pekerjaan terdaftar dengan status dokumen lengkap

### 2. Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:

#### a) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa.

Tabel 2.5.

## Indikator Kerja Subbag Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Yang Berjalan Optimal dalam Menunjang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100 %
		Prosentase Efektivitas Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	70%

## b) Sub Bagian Pengelolaan LPSE.

Tabel 2.6.

## Indikator Kerja Subbag Pengelolaan LPSE

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik	Prosentase Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Yang Berjalan Optimal	100 %
		Prosentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Yang Berjalan Sesuai SOP	100%

## 3. Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi :

## a) Sub Bagian Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tabel 2.7.

## Indikator Kerja Subbag Pembinaan SDM dan Kelembagaan

## Pengadaan Barang/Jasa

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang Disosialisasikan	100 %



b) Sub Bagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

Tabel 2.8.

Indikator Kerja Subbag Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Pembentukan Tim Advokasi	100%
		Penyusunan Kode Etik, SOP Manajemen Risiko dan Dokumen Mitigasi Risiko	100%
		Fasilitasi Pelaporan Korsupgah dan Stranas PK	100%
		Sosialisasi dan Advokasi Kegiatan Konsolidasi PBJ serta Kode Etik	100%
		Prosentase Penanganan Konsultasi, Aduan/Sanggah/Sengketa dan Pendampingan Permasalahan Hukum (termasuk Sanksi Daftar Hitam) yang Difasilitasi	100%

c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Tabel 2.9.

Indikator Kerja Subbag Tata Usaha Biro

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	100%
2.	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	100%
3.	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	100%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2019, BIRO APBJ telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan Rencana Strategis Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah, sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran : Meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengadaan barang/jasa serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum, dan pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis tersebut terdiri dari 11 (sebelas) indikator yaitu : Jumlah Dokumen SHB dan ASB, Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa, Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa, Persentase sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang berjalan optimal, Persentase layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang berjalan sesuai SOP, Persentase sistem informasi pengadaan barang/jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Persentase peraturan pengadaan barang/jasa yang disosialisasikan, Persentase aduan dan sengketa yang difasilitasi, Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.

Tabel 3.2.  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah  
 (Khusus terkait dengan Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<b>Optimalisasi tata kerja pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa</b>	1) Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah Bidang Pengadaan Barang/Jasa, 2) Penguatan Kapasitas ASN Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah , 3) Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah dan, 4) Penguatan Pelaksanaan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
		<b>Optimalisasi pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa</b>	
		<b>Peningkatan kapasitas SDM, pembinaan kelembagaan, dan advokasi pengadaan barang/jasa</b>	

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tujuan</b>			
	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80 %
<b>Sasaran</b>			
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	60 %

**B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN**

**Indikator Sasaran :** Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa

Tabel 3.4.

Capaian Indikator Sasaran

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2019	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2019 Atas Target Renstra
Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	60	96,93	70	138,37%

Persentase Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang terealisasi 96,93% dengan ketercapaian sebesar 161,55% terhadap target. Tahun 2019 terdapat 1452 paket pengadaan barang jasa yang diproses menggunakan Aplikasi SPSE, meliputi : 829 paket tender dan 623 paket non tender. Pada Biro APBJ terdapat 880 paket yang didaftarkan oleh seluruh OPD Prov. Jateng. Dari 880 paket yang didaftarkan, 853 paket berhasil diselesaikan sedangkan 27 paket dikembalikan ke masing-masing OPD terkait.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2019 adapun upaya yang telah dilakukan Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan program dan kegiatan, yaitu :

1. **Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa**, membawahi :

a) **Subbagian Pengkajian Dan Standarisasi Pengadaan.**

Guna pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Subbag Pengkajian dan Standarisasi barang/jasa diantaranya :

- 1) Bimbingan Teknis Penyusunan dan Kebijakan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Jawa Tengah.

Dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Juli 2019 bertempat di Hotel “Lor-In” Solo, dengan target peserta sebanyak 90 orang berasal dari seluruh SKPD Jawa Tengah

Narasumber Rakor Berasal dari :

(a) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa DKI Jakarta.

(b) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI).

- 2) Kegiatan Standarisasi Harga dan Biaya pada Tahun Anggaran 2019 masih melekat pada Biro Umum dikarenakan DPA Tahun 2019 sudah di anggarkan oleh Biro Umum dimana Biro Adm. Pengadaan Barang/Jasa sesuai Pergub 70 Tahun 2018 tanggal 5 November 2019. Biro Adm. Pengadaan Barang/Jasa ikut terlibat dalam penyusunan SHB sebagai Tim/Panitia Penyusunan Standarisasi Harga dan Biaya Tahun 2019.
- 3) Kegiatan Analisis Standar Biaya (ASB) telah dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dan Biro Adm. Pengadaan Barang/Jasa telah di ikutsertakan sebagai Tim Penyusun ASB Tahun 2019.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan diluar pemenuhan Perjanjian Kinerja diantaranya :

- 1) Pemilihan Penyedia Jasa Katalog Elektronik Lokal komoditas Aspal Buton (CPHMA).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi target yang ditetapkan oleh Tim Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) KPK RI yang diharapkan pada B09 (bulan September) Tahun 2019 sudah bisa ditayangkan dan dilakukan e-purchasing komoditas Katalog Elektronik Lokal Provinsi Jawa Tengah.

Progres pemenuhan Persyaratan tersebut sampai dengan 31 Desember 2019 sebagaimana terurai pada tabel di bawah ini :

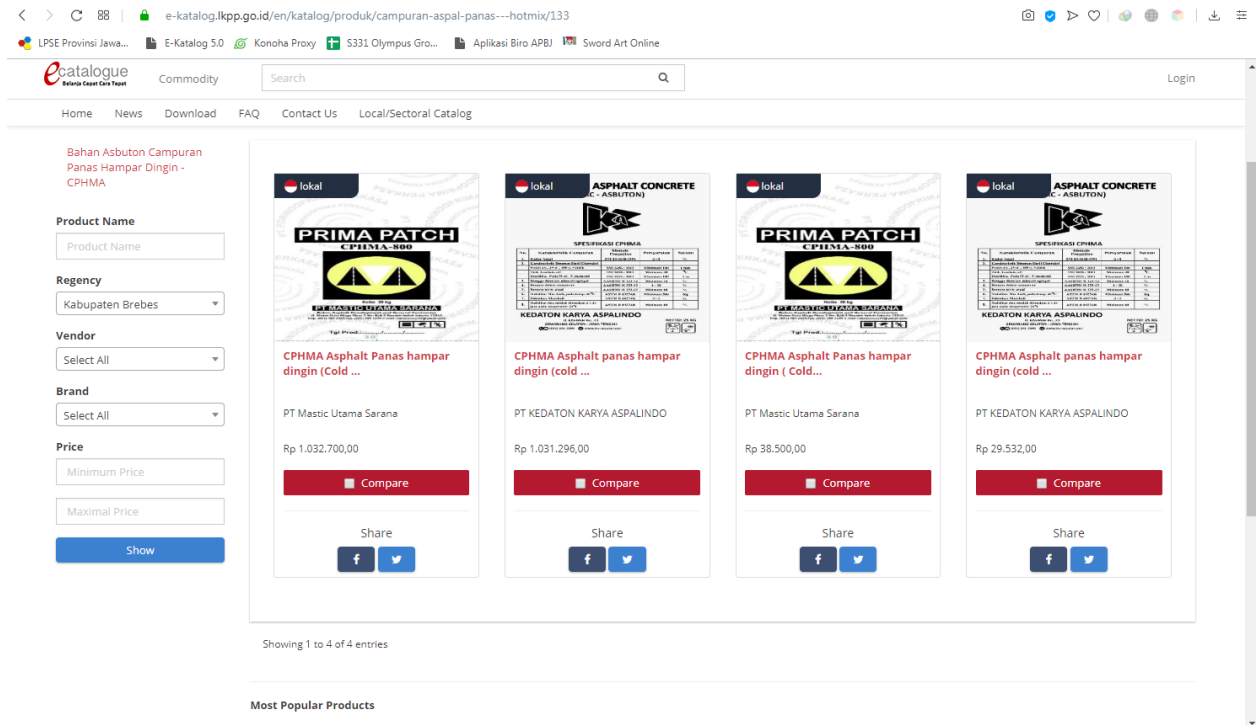
Tabel 3.5.

Progres Pemenuhan Persyaratan Katalog Elektronik Lokal

VARIABLE	TARGET PEMENUHAN	KETERANGAN
Proses Pengadaan/Pemilihan Penyedia Jasa	April s.d Juli 2019	Terpenuhi
Penetapan Penyedia Jasa terpilih	Agustus	Terpenuhi
Kontrak Payung	November	Terpenuhi
Penayangan Komoditas	Desember	Terpenuhi
Pembelian komoditas/ <i>e-purchasing</i>	Desember	Dalam proses

Gambar 3.1.

## Bahan Asbuton CPHM sudah tayang pada Katalog Elektronik v.5.0 LKPP RI



2) Melakukan kegiatan proses pemilihan penyedia jasa Katalog Elektronik Lokal.

Proses yang sudah dilakukan dalam rangka optimalisasi Pemilihan Penyedia Jasa adalah :

- (a) Telah melakukan proses pengkajian atas usulan komoditas yang akan diproses kedalam Katalog elektronik lokal
- (b) Pasca proses pemilihan dilakukan review atas hasil dan metode pemilihan yang digunakan.
- (c) Fasilitasi penyedia katalog elektronik lokal terpilih untuk dilakukan Kontrak Payung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### b) Subbagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Guna pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Subbag Perencanaan Pengadaan barang/jasa diantaranya :

1) Melaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019.

Dilaksanakan pada tanggal 30-31 Januari 2019 bertempat di Hotel "Swiss Belin" Surakarta, dengan target peserta sebanyak 108 orang berasal dari seluruh SKPD Jawa Tengah (49 SKPD) dan Pokja Pemilihan dari Biro APBJ.

Narasumber Bimbingan Teknis tersebut Berasal dari :

- (a) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) dengan materi Metode Pemilihan Penyedia

- melalui E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Dikecualikan dan Konsolidasi.
- (b) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Materi metode Pemilihan melalui Swakelola dan Penunjukan Langsung.
  - (c) Biro Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dengan materi Prosedur Pencairan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Melaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020.  
Dilaksanakan pada tanggal 30-31 Oktober 2019 bertempat di Hotel “Lor in Syariah” Surakarta, dengan target peserta sebanyak 100 orang berasal dari seluruh SKPD Jawa Tengah (49 SKPD).  
Narasumber Bimbingan Teknis tersebut Berasal dari:
- (a) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) dengan materi perencanaan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dan Konsolidasi.
  - (b) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Materi perencanaan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia.
- 3) Bersama-sama dengan Biro Administrasi Pembangunan Daerah melakukan Desk Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dengan sasaran 49 SKPD.
- 4) Melakukan Monitoring dan Evaluasi dengan cara Permohonan penyampaian data proses pengadaan Barang/Jasa dari masing-masing SKPD untuk dianalisa kesesuaiannya dengan RUP yang ada pada Aplikasi SPSE.
- 5) Melakukan Desk Pemaketan dan Konsolidasi pada tanggal 23 dan 26 Desember 2019.

Progres pemenuhan persyaratan tersebut sampai dengan 31 Desember 2019 sebagaimana terurai pada tabel dan kondisi Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SiRUP LKPP berikut:

Tabel 3.6.

Progres pemenuhan persyaratan

VARIABLE	TARGET PEMENUHAN	KETERANGAN
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa TA. 2019	Januari 2019	Terpenuhi
Pemaketan dan Penjadwalan Pengadaan Barang/Jasa pada Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa TA. 2019	Februari 2019	Terpenuhi
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa TA. 2020	Desember 2019	Terpenuhi



RUP 2019 Provinsi Jawa Tengah melalui SiRUP LKPP sampai dengan 31 Desember 2019 :

Gambar 3.2.

Bahan Asbuton CPHM sudah tayang pada Katalog Elektronik v.5.0 LKPP RI

No	K/L/PD	Penyedia		Swakelola		Penyedia dalam Swakelola		Total	
		Pkt	Pagu	Keg.	Pagu	Pkt	Pagu	Keg.+ Pkt	Total Pagu
10	<a href="#">Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah</a>	<a href="#">8624</a>	3.400.024	<a href="#">9110</a>	2.109.514	<a href="#">1887</a>	163.851	19.621	5.673.390

Keterangan:  
Nilai Pagu dalam jutaan rupiah.

Tabel 3.7.

### REKAPITULASI KESESUAIAN PAKET TAHUN ANGGARAN 2019

No	MELALUI	JUMLAH DI RUP		PAKET		PROSENTASE		ANGGARAN SKPD	
		Paket	Pagu	SESUAI	TDK SESUAI	SESUAI	TDK SESUAI	TOTAL	%
1	PENYEDIA	8624	3.398.277.617.233	8010	614	92,88	7,12	8.175.731.334.000	41,57
2	SWAKELOLA	9110	2.061.627.086.032	8396	714	92,16	7,84	8.175.731.334.000	25,22
3	PENYEDIA SWAKELOLA	1887	163.851.121.000	1733	154	91,84	8,16	8.175.731.334.000	2,00
TOTAL		19621	5.623.755.824.265	18139	1.482	92,29	7,71	8.175.731.334.000	68,79

#### c) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Guna pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Subbag Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diantaranya :

- 1) Melakukan rapat koordinasi Persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa bersama dengan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Fasilitasi Pokja Pemilihan untuk melakukan reuiu dokumen persiapan pengadaan (KAK/Spesifikasi Teknis, Gambar, HPS dan Rancangan Kontrak) dari PPK.
- 3) Fasilitasi Pokja Pemilihan untuk melakukan pemberian penjelasan secara online melalui aplikasi SPSE.

- 4) Fasilitas Pokja Pemilihan untuk melakukan klasifikasi lapangan bagi calon pemenang tender/seleksi/penunjukan langsung.
- 5) Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa.
- 6) Menyusun evaluasi dan laporan fasilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019, Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah telah menenderkan 853 paket dengan total Pagu Rp. 1.845.022.070.467,20, total Nilai Pemenang Rp. 1.534.582.460.602,77, dan total sisa anggaran/efisiensi Rp. 310.439.609.864,43,-.

Tabel 3.8.

Proses Paket Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019

No	Satker Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Jml Paket	Pagu (Rp.)	Harga Pemenang (Rp.)	Sisa Anggaran/ Efisiensi (Rp.)
1	Sekretariat DPRD	5	3.592.706.000,00	2.164.998.656,10	1.427.707.343,90
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	1.318.600.000,00	1.185.675.000,00	132.925.000,00
3	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	48	36.131.670.000,00	28.512.712.948,47	7.618.957.051,53
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4	2.862.967.000,00	1.842.811.300,00	1.020.155.700,00
5	Badan Kepegawaian Daerah	2	1.698.000.000,00	1.362.013.202,94	335.986.797,06
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	21	14.951.393.592,00	12.965.084.537,38	1.986.309.054,62
7	Badan Penghubung	3	3.669.600.000,00	3.440.448.898,58	229.151.101,42
8	Badan Kesbangpol	1	18.764.420.000,00	16.399.035.000,00	2.365.385.000,00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44	115.887.917.481,00	105.820.946.933,68	10.066.970.547,32
10	Dinas Kesehatan	20	41.798.535.000,00	37.181.344.723,35	4.617.190.276,65
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	234	646.124.058.666,61	495.678.571.886,26	150.445.486.780,35
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	62	114.118.108.000,00	99.004.456.305,99	15.113.651.694,01
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16	6.592.268.000,00	5.853.131.124,51	739.136.875,49
14	Dinas Sosial	6	6.712.760.000,00	5.793.893.389,07	918.866.610,93
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	1.858.099.961,00	1.553.318.948,70	304.781.012,30
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	360.000.000,00	332.123.840,00	27.876.160,00
17	Dinas Ketahanan Pangan	8	7.856.740.000,00	7.571.339.500,00	285.400.500,00
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27	15.184.012.509,59	13.316.907.383,47	1.867.105.126,12
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	4.396.961.000,00	3.831.717.546,16	565.243.453,84

20	Dinas Perhubungan	34	64.684.464.000,00	62.746.892.575,01	1.937.571.424,99
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	13.504.465.000,00	12.851.285.500,00	653.179.500,00
22	Dinas Koperasi dan UKM	7	5.305.800.000,00	4.647.891.671,74	657.908.328,26
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	1.837.891.000,00	1.381.984.388,00	455.906.612,00
24	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	40	440.123.409.600,00	376.329.561.890,60	63.793.847.709,40
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	1.524.500.000,00	1.237.913.600,00	286.586.400,00
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	18	17.165.100.000,00	15.669.799.729,54	1.495.300.270,46
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan	50	47.249.895.950,00	42.219.790.903,74	5.030.105.046,26
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	38	39.505.371.000,00	35.572.561.883,80	3.932.809.116,20
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	66	31.387.444.000,00	23.763.754.986,08	7.623.689.013,92
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11	10.244.965.000,00	9.225.858.203,66	1.019.106.796,34
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	3.586.500.000,00	3.528.807.800,00	57.692.200,00
32	Badan Pemerintahan, Otda dan Kerjasama	1	300.000.000,00	273.373.210,00	26.626.790,00
33	Biro Kesejahteraan Rakyat	1	392.030.000,00	316.330.000,00	75.700.000,00
34	Biro Infrastruktur dan SDA	1	200.000.000,00	183.029.000,00	16.971.000,00
35	Biro Umum	7	7.541.667.000,00	7.269.285.725,00	272.381.275,00
36	Satpol PP	1	560.838.000,00	500.219.500,00	60.618.500,00
37	RSUD Dr. Moewardi	1	9.800.000.000,00	8.992.292.000,00	807.708.000,00
38	RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo	17	27.091.319.491,00	19.748.911.629,01	7.342.407.861,99
39	RSUD Tugurejo	10	18.819.358.966,00	16.192.721.705,81	2.626.637.260,19
40	RSUD Kelet	1	464.012.000,00	456.500.000,00	7.512.000,00
41	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	5	8.499.999.250,00	7.856.689.998,09	643.309.251,91
42	RSJD Surakarta	8	21.533.479.000,00	18.371.451.388,03	3.162.027.611,97
43	RSJD Dr. Soedjarwadi	3	5.100.000.000,00	4.393.313.390,00	706.686.610,00
44	Badan Pengawas Pemilu	6	24.720.744.000,00	17.041.708.800,00	7.679.035.200,00
Jumlah		853	1.845.022.070.467,20	1.534.582.460.602,77	310.439.609.864,43

## 2. Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi :

### a) Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa.

Guna pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Subbag Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa diantaranya :

- 1) Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Standarisasi LPSE 2014 dengan Fokus Pada Standarisasi Sistem Keamanan Informasi, dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 11 September 2019 bertempat di The Sunan Hotel Jl. Ahmad Yani No. 40 Kerten Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Standarisasi LPSE 2014 dengan Fokus pada Standarisasi Sistem Keamanan Informasi diikuti oleh 13 Kab/Kota pada wilayah Bakorwil II

Narasumber Bimbingan Teknis berasal dari Penelaah Kebijakan Barang/Jasa LKPP

- 2) Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Standarisasi Sistem Keamanan Informasi dalam Rangka Percepatan Standarisasi LPSE Tahun 2014 bagi LSPE Kab/Kota eks Bakorwil I dan III, dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 27 September 2019, bertempat di Hotel Grand Karlita, Jl. S. Parman No. 296 Purwokerto. Narasumber berasal dari :
  - (a) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah.
  - (b) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI).
- 3) Acara Launching dan Bimbingan Teknis SILALAPBAJA, dilaksanakan pada Hari Senin s.d Selasa tanggal 28 s.d. 29 Oktober 2019, bertempat di The Sunan Hotel Jl. Ahmad Yani 40 Solo. Target peserta sejumlah 98 orang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Narasumber berasal dari :
  - (a) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah.
  - (b) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa TA 2019 dan Persiapan Menuju TA 2020, dilaksanakan pada tanggal 06 s.d 07 Desember 2019 bertempat di Hotel D'Season Premier, Jl. Pariwisata No. 09, RW. II, Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Target peserta seuruh staff bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Narasumber berasal dari :
  - (a) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah.
  - (b) Tenaga Ahli Motivasi dan Psikologi.
- 5) Pengembangan Sistem Layanan Langsung Pengadaan Barang Jasa (SILALAP BAJA).

SILALAP BAJA adalah Sistem Layanan Langsung Pengadaan Barang Jasa, aplikasi berbasis Web ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi Smart Report, Pengadaan dan Pelayanan.

Tujuan SILALAP BAJA adalah untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa pada provinsi Jawa Tengah agar lebih efisien, efektif, transparan dan paperless.

Menu Pengadaan, berfungsi untuk pemasukan dokumen tender bagi SKPD dan berguna untuk melakukan pelacakan posisi paket tender oleh PPK SKPD, persiapan pengadaan sebelum masuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) selain memudahkan proses koordinasi tender pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.

Menu Pelayanan, berfungsi untuk memberi kemudahan bagi penyedia dalam melakukan konsultasi ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah dan penyedia dapat

mengetahui antrian pelayanan melalui website sehingga penyedia dapat menghemat waktu dan mengurangi waktu tunggu antrian pelayanan.

Menu Smart Report, berfungsi untuk menampilkan rekap seluruh proses tender yg dilakukan oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa baik dari jumlah pagu, pagu selesai, nilai kontrak serta efisiensi yang dilakukan setelah melakukan tender menggunakan sistem SPSE.

**b) Subbagian Pengelolaan LPSE.**

Guna pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Subbag Pengelolaan LPSE Provinsi Jawa Tengah diantaranya :

- 1) Pelaksanaan Bimtek Aplikasi SIRUP versi 2.3 dan aplikasi SPSE ver 4.3 CA dan e-Pengadaan Langsung bagi PPKom dan Pejabat Pengadaan di lingkungan SKPD Provinsi Jawa Tengah bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga tanggal 19-21 Februari 2019. Jumlah Peserta sebanyak 98 peserta dengan Narasumber kegiatan dari Direktorat Pengembangan SPSE LKPP dan narasumber internal Biro Administasi PBJ Setda Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Bimbingan Teknis aplikasi SPSE ver 4.3 CA dan sosialisasi penginputan SIKAP untuk Penyedia di Ruang Training LPSE Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 55 orang. Narasumber internal Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Bimbingan Teknis aplikasi SPSE ver 4.3 CA untuk Pokja Pemilihan di Ruang Training LPSE Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang. Narasumber internal Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah.
- 4) FGD Standarisasi Layanan LPSE:2014 untuk LPSE se eks Bakorwil II di Hotel Sunan Surakarta pada tanggal 10-11 September 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Narasumber dari Direktorat Pengembangan SPSE LKPP.
- 5) Bimbingan Teknis perencanaan dan penginputan SIRUP untuk PPKom dan admin RUP Versi 2.3 dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 29 November 2019 bertempat di The Sunan Hotel Jl. Ahmad Yani No. 40 Kerten Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Jumlah peserta 98 orang narasumber pada pelaksanaan Bimtek SIRUP dari Internal Biro Administrasi PBJ Setda Provinsi Jawa Tengah
- 6) Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) LPSE Jawa Tengah Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 11 Desember 2019 bertempat di The Sunan Hotel Jl. Ahmad Yani No. 40 Kerten Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Materi RAKORTEK LPSE Jawa Tengah Tahun 2019 tentang Kebijakan Penerapan Aplikasi SPSE 4.3 CA dan Non CA di Provinsi Jawa Tengah dan terkait dengan LPSE Support serta Standarisasi LPSE Tahun 2014, Jumlah peserta kegiatan LPSE Kabupaten Kota se Jawa Tengah, LPSE Universitas negeri di Jawa Tengah dan LPSE Polda Jawa Tengah. Jumlah Peserta sebanyak 82 orang. Narasumber

Direktur Pengembangan SPSE dan 3 orang pejabat di Dit. Pengembangan SPSE.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan diluar pemenuhan Perjanjian Kinerja diantaranya :

- 1) FGD implementasi Spamkodok versi 2.0.1 versi browser yang dinamai Blaster. FGD diikuti oleh peserta 14 LPSE Pengguna aplikasi Spamkodok acara diselenggarakan oleh Dit.PSPSE LKPP bertempat di Hotel Novotel Semarang pada tanggal 25 – 26 Februari 2019 bertujuan untuk trial dan mencari bugs pengembangan aplikasi versi terbaru tersebut.
- 2) FGD uji coba Spamkodok ver 2.0.2 Blaster diselenggarakan oleh Dit. PSPSE diikuti peserta 14 LPSE Pengguna Spamkodok dengan tujuan pada trial dan penanganan bugs tahap II bertempat di Hotel Courtyard by Marriot Bandung pada tanggal 26 – 29 Maret 2019.
- 3) Workshop Peningkatan Kapasitas LPSE di Regional Jawa pada tanggal 14-16 Mei 2019 di Hotel JW Marriot Surabaya
- 4) Rakornas LPSE Provinsi se Indonesia di LPSE Provinsi Sulawesi Utara Manado pada tanggal 13-15 Agustus 2019 tema “Era Baru LPSE Provinsi untuk Indonesia Maju”.
- 5) Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh LKPP di Balai Sidang Convention Center Jakarta pada tanggal 5-7 November 2019. Tema “Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju”. Dalam kesempatan tersebut diberikan anugerah bagi LPSE Provinsi Jawa Tengah “Award Komitmen Penerapan 17 Standarisasi LPSE : 2014” yang diterima oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak H.Taj Yasin Maemoen.
- 6) Pada tahun 2019 data paket non tender yang tercatat dalam aplikasi SPSE sebanyak 623 paket, jumlah pagu 85.373.387.125,00 dan jumlah realisasi 74.298.077.405,16. Sedangkan untuk paket tender sebanyak 830 paket, jumlah pagu 1.820.826.230.041,00 dan jumlah realisasi 1.504.357.993.920,85. Sebagaimana daftar pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9.

Rekap Non Tender 2019

No	SATKER	Jml	PAGU TOTAL	REALISASI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	10	1.637.519.000,00	1.107.961.859,09
2	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	10	6.352.204.140,00	3.409.542.000,00
3	BADAN PENGHUBUNG	6	569.740.000,00	535.404.700,00
4	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	3	220.860.000,00	220.860.000,00
5	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	77	10.699.410.000,00	8.487.993.961,22
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	32	3.977.452.000,00	3.903.126.659,18
7	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	7	1.327.875.000,00	1.014.685.000,00
8	DINAS KESEHATAN	13	1.583.678.000,00	1.415.901.072,50
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	19	2.155.400.000,00	2.091.447.168,01

10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	840.675.000,00	828.656.200,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	170	18.370.633.000,00	17.496.930.400,53
12	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	58	8.227.247.000,00	6.850.046.239,62
13	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	19	3.521.024.000,00	3.474.274.397,35
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	1.627.836.000,00	1.499.058.000,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9	786.000.000,00	704.787.500,00
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	205.072.000,00	194.506.000,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	27	2.719.500.000,00	2.671.188.949,78
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	51	3.698.609.425,00	3.559.290.387,13
19	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	38	6.306.477.560,00	5.062.748.894,90
20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23	2.709.200.000,00	2.431.715.000,00
21	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	34	4.559.500.000,00	4.204.342.975,85
22	RSJD DR. RM. SOEDJARWADI	1	1.850.000.000,00	1.709.000.040,00
23	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1	1.427.475.000,00	1.424.610.000,00
TOTAL		623	85.373.387.125,00	74.298.077.405,16

Tabel 3.10.  
Rekap Tender 2019

No	SATKER	SELESAI	BELUM SELESAI	Jml	PAGU TOTAL	REALISASI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	0	1	1.293.000.000,00	960.763.202,94
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	0	1	18.764.420.000,00	16.399.035.000,00
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4	0	4	2.862.967.000,00	1.842.811.300,00
4	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	45	0	45	35.324.326.000,00	27.769.767.174,87
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	17	0	17	12.027.743.592,00	10.615.973.209,38
6	BADAN PENGHUBUNG	3	0	3	3.669.600.000,00	3.440.448.898,58
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3	0	3	1.318.600.000,00	1.185.675.000,00
8	BADAN PUSAT STATISTIK PROP JAWA TENGAH	6	0	6	4.741.716.000,00	3.404.394.492,00
9	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA	1	0	1	200.000.000,00	183.029.000,00
10	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	0	1	392.030.000,00	316.330.000,00
11	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA	1	0	1	300.000.000,00	273.373.210,00
12	BIRO UMUM	6	0	6	7.541.667.000,00	7.033.786.625,00
13	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	65	0	65	30.587.044.000,00	23.384.861.266,48

14	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2	0	2	1.524.500.000,00	1.237.913.600,00
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	18	0	18	17.165.500.000,00	15.669.799.008,69
16	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	40	0	40	440.123.409.600,00	376.329.578.646,70
17	DINAS KESEHATAN	20	0	20	41.804.542.000,00	37.181.344.723,35
18	DINAS KETAHANAN PANGAN	8	0	8	7.856.740.000,00	7.571.339.500,00
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	0	4	13.504.465.000,00	12.851.285.500,00
20	DINAS KOPERASI DAN UKM	4	0	4	4.905.800.000,00	3.912.310.671,74
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	27	0	27	15.184.037.000,00	13.316.907.383,47
22	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	235	0	235	647.628.798.000,00	496.676.734.094,51
23	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	62	1	63	113.694.744.000,00	97.719.333.023,77
24	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2	0	2	2.073.200.000,00	1.692.233.546,16
25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	0	1	360.000.000,00	332.123.840,00
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3	0	3	1.837.891.000,00	1.381.984.388,00
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	41	0	41	105.124.287.481,00	96.701.179.829,45
28	DINAS PERHUBUNGAN	34	0	34	64.684.464.000,00	62.746.892.575,01
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	0	10	9.522.375.000,00	8.825.898.203,66
30	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	46	0	46	38.340.520.950,00	33.015.249.028,74
31	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13	0	13	5.492.268.000,00	4.626.194.124,51
32	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	37	0	37	39.089.121.000,00	35.144.718.133,80
33	DINAS SOSIAL	6	0	6	6.625.810.000,00	5.793.893.390,07
34	DIREKTORAT PEMBINAAN PK DAN LK	2	0	2	9.986.000.000,00	8.355.180.204,23
35	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4	0	4	1.858.099.961,00	1.553.318.948,70
36	RSJD DR, AMINO GONDHUTOMO	5	0	5	10.964.105.000,00	9.228.189.998,09
37	RSJD DR, RM, SOEDJARWADI	1	0	1	2.150.000.000,00	1.998.563.350,00
38	RSJD SURAKARTA	8	0	8	22.419.374.000,00	18.983.649.038,03
39	RSUD DR, MOEWARDI	1	0	1	9.800.000.000,00	8.992.292.000,00
40	RSUD PROF, DR, MARGONO SOEKARJO	17	0	17	27.091.320.491,00	19.617.359.229,01
41	RSUD TUGUREJO SEMARANG	9	0	9	17.869.358.966,00	15.459.766.405,81
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	0	1	560.838.000,00	500.219.500,00
43	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	3	0	3	2.158.500.000,00	2.104.197.800,00



44	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	0	1	772.310.000,00	764.586.900,00
45	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	5	0	5	16.038.031.000,00	5.098.510.300,00
46	SEKRETARIAT DPRD	5	0	5	3.592.706.000,00	2.164.998.656,10
	TOTAL	829	1	830	1.820.826.230.041,00	1.504.357.993.920,85

7) Pada tahun 2019, data penyedia yang tercatat dalam aplikasi SPSE sebanyak 4.769 penyedia dan penyedia terverifikasi memiliki sertifikat digital sebanyak 5.090 penyedia. Sebagaimana daftar pada table di bawah ini :

Tabel 3.11.

*Tabel Rekap Penyedia telah memiliki sertifikat digital Tahun 2013-2019*

Tahun	Perusahaan			TOTAL PERTAHUN
	CV	PT	PERORANGAN	
2013	84	48	0	132
2014	1429	572	32	2033
2015	699	268	15	982
2016	418	278	13	709
2017	255	234	10	499
2018	282	237	4	523
2019	126	82	4	212
TOTAL	3293	1719	78	5090

*Sumber : diskominfo.jatengprov.go.id/lpse*

Tabel 3.12.

*Tabel Rekap Penyedia baru teraktivasi di LPSE Provinsi Jawa Tengah Sampai dengan tahun 2019*

Tahun	Perusahaan			TOTAL PERTAHUN
	CV	PT	PERORANGAN	
	3448	1227	94	4769
TOTAL	3448	1227	94	4769

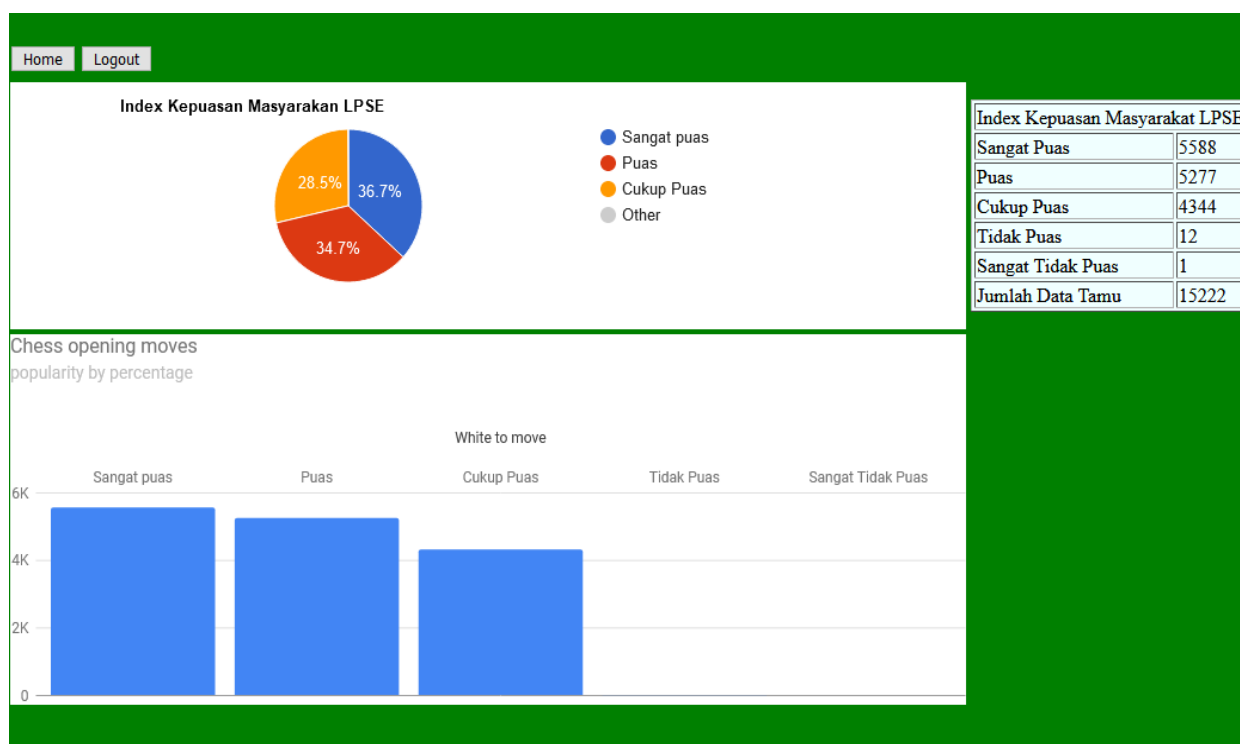
*Sumber : lpse.jatengprov.go.id*

8) Variabel lain dari Indeks profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa adalah Indeks kepuasan pengguna layanan LPSE ini dilakukan. Metode pengukurannya antara lain dengan melaksanakan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan menggunakan data sekunder berupa data kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan tanggapan masyarakat mengenai kinerja layanan LPSE. Metode pengumpulan data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terbuka dan tertutup. Periode pengumpulan data yaitu selama bulan 2019. Pada tahun 2018, survei dilakukan di LPSE kepada tamu pengunjung di LPSE secara online sebanyak jumlah : 15.222 tamu, dan tertulis diambil 30 responden. Untuk capaian tahun 2019 indeks kepuasan pengguna layanan LPSE adalah sebesar 99,9%. Adapun nilai/skor persepsi, Interval SKM, Interval Konversi

SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang digunakan sebagaimana daftar pada table di bawah ini :

Gambar 3.3.

**Gambar Diagram Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan LPSE**



Sumber : [Diskominfo.jatengprov.go.id/lpse/](http://Diskominfo.jatengprov.go.id/lpse/)

- 9) Salah satu sanksi yang diatur atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha/Penyedia dalam keterlibatan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengenaan sanksi daftar hitam. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Pada tahun 2019 terdapat 13 Penyedia yang melakukan tindak pelanggaran dan dikenai sanksi daftar hitam sebagaimana dalam table di bawah ini :

Tabel 3.13.

*Tabel Penyedia yang terkena sanksi Daftar Hitam Tahun 2019*

No	Nama Perusahaan	Jenis Pengadaan	Bulan Penayangan	Jumlah Paket
1	PT. Pilar Cadas Putra	Pengadaan Barang	Maret 2019	1
2	PT. Yatchs Baroka	Pekerjaan Konstruksi	April 2019	1
3	CV. Putra Semesta	Pengadaan Barang	Mei 2019	1
4	CV. Mikkorama	Pekerjaan Konstruksi	Juni 2019	1
5	CV. Mitra Persada	Pekerjaan Konstruksi	Juni 2019	1
6	PT. Dipomulyo Mas	Pekerjaan Konstruksi	2 Juli 2019	1
7	PT. Mitra Gelaran Bersama	Pekerjaan Konstruksi	2 Juli 2019	1
8	Diansindo Pratama	Pekerjaan Konstruksi	2 Juli 2019	1

9	PT. Sarana Waskita Tata	Pekerjaan Konstruksi	2 Juli 2019	1
10	PT. Mumpuni	Pekerjaan Konstruksi	2 Juli 2019	1
11	Putra Semesta	Pengadaan Barang	22 Mei 2019	1
12	CV. Surya Putra Kenanga	Pekerjaan Konstruksi	25 Juni 2019	1
13	CV. Ragil Jaya	Pengadaan Barang	25 Oktober 2019	1

Sumber : Inaproc.id

10) Hasil dari capaian Terpenuhinya Standarisasi Layanan LPSE : 2014 pada LPSE di Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.14.

**Tabel Perolehan Standarisasi LPSE : 2014**

NO	ID	LPSE / PROVINSI	STANDARDISASI	PARTISIPASI KEGIATAN
1.	637	LPSE Universitas Negeri Sebelas Maret	Ya 4	Tidak 0 Orang 0 Kegiatan
2.	314	LPSE Kabupaten Wonogiri	Ya 8	Ya 13 Orang 12 Kegiatan
3.	141	LPSE Kabupaten Karanganyar	Ya 12	Ya 4 Orang 4 Kegiatan
4.	216	LPSE Universitas Negeri Semarang	Ya 4	Tidak 0 Orang 0 Kegiatan
5.	287	LPSE Kabupaten Tegal	Ya 12	Ya 8 Orang 10 Kegiatan
6.	146	LPSE Kabupaten Purworejo	Ya 9	Ya 6 Orang 6 Kegiatan
7.	423	LPSE Kabupaten Demak	Ya 9	Ya 3 Orang 2 Kegiatan
8.	569	LPSE Polda Jawa Tengah	Tidak 0	Tidak 0 Orang 0 Kegiatan
9.	29	LPSE Universitas Diponegoro	Ya 5	Ya 3 Orang 3 Kegiatan
10.	138	LPSE Kabupaten Temanggung	Ya 3	Ya 3 Orang 3 Kegiatan
11.	220	LPSE Kabupaten Wonosobo	Ya 4	Ya 3 Orang 3 Kegiatan
12.	88	LPSE Kota Salatiga	Ya 8	Ya 3 Orang 3 Kegiatan
13.	91	LPSE Kota Pekalongan	Ya 11	Ya 8 Orang 8 Kegiatan
14.	279	LPSE Kota Magelang	Ya 12	Ya 3 Orang 5 Kegiatan

15.	334	LPSE Kabupaten Pati	Ya 10	Ya 6 Orang 9 Kegiatan
16.	140	LPSE Kabupaten Purbalingga	Ya 8	Ya 5 Orang 3 Kegiatan
17.	182	LPSE Kabupaten Jepara	Ya 3	Ya 5 Orang 4 Kegiatan
18.	202	LPSE Kabupaten Pekalongan	Ya 10	Ya 10 Orang 11 Kegiatan
19.	257	LPSE Kabupaten Blora	Ya 4	Ya 4 Orang 5 Kegiatan
20.	280	LPSE Kabupaten Boyolali	Ya 12	Ya 7 Orang 10 Kegiatan
21.	286	LPSE Kabupaten Cilacap	Ya 6	Ya 5 Orang 7 Kegiatan
22.	211	LPSE Kabupaten Grobogan	Ya 9	Ya 3 Orang 9 Kegiatan
23.	94	LPSE Kabupaten Kudus	Ya 9	Ya 9 Orang 9 Kegiatan
24.	209	LPSE Kabupaten Batang	Ya 6	Ya 7 Orang 6 Kegiatan
25.	228	LPSE Kabupaten Sragen	Ya 12	Ya 4 Orang 3 Kegiatan
26.	90	LPSE Kabupaten Pemalang	Ya 9	Ya 7 Orang 7 Kegiatan
27.	148	LPSE Kabupaten Brebes	Ya 9	Ya 6 Orang 7 Kegiatan
28.	104	LPSE Kota Surakarta	Ya 12	Ya 10 Orang 8 Kegiatan
29.	108	LPSE Kota Semarang	Ya 12	Ya 5 Orang 3 Kegiatan
30.	115	LPSE Kabupaten Magelang	Ya 9	Ya 2 Orang 2 Kegiatan
31.	160	LPSE Kabupaten Sukoharjo	Ya 12	Ya 2 Orang 2 Kegiatan
32.	227	LPSE Universitas Jenderal Soedirman	Ya 3	Ya 4 Orang 1 Kegiatan
33.	42	LPSE Provinsi Jawa Tengah	Ya 17	Ya 19 Orang 15 Kegiatan
34.	51	LPSE Kabupaten Klaten	Ya 10	Ya 6 Orang 5 Kegiatan
35.	53	LPSE Kabupaten Kebumen	Ya 5	Ya 6 Orang 6 Kegiatan

36.	60	LPSE Kabupaten Banyumas	Ya 11	Ya 10 Orang 7 Kegiatan
37.	32	LPSE Kabupaten Semarang	Ya 6	Ya 7 Orang 9 Kegiatan
38.	129	LPSE Kabupaten Banjarnegara	Ya 6	Ya 8 Orang 7 Kegiatan
39.	501	LPSE Kabupaten Kendal	Ya 8	Ya 12 Orang 6 Kegiatan
40.	48	LPSE Kota Tegal	Ya 10	Ya 4 Orang 7 Kegiatan
41.	375	LPSE Kabupaten Rembang	Ya 8	Ya 2 Orang 4 Kegiatan

Sumber : [eproc.lkpp.go.id](http://eproc.lkpp.go.id)

3. **Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa**, membawahi:

a) **Subbagian Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;**

Guna pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Subbag Pembinaan SDM dan Kelembagaan Barang/Jasa diantaranya :

1) Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakor UKPBJ) Kabupaten Kota se Jawa Tengah.

Dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Maret 2019 bertempat di Hotel "Swiss-belinn Saripetojo" Solo. Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 437 Solo. Dengan target peserta sebanyak 70 orang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kota se Jawa Tengah dari instansi yang membidangi Kelembagaan dan Pengadaan Barang/Jasa.

Narasumber Rakor Berasal dari :

- (a) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah.
- (b) Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah.
- (c) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI).

2) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kontrak Konsolidasi Dan Kontrak tahun Jamak Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Juni 2019 bertempat di Hotel "Grand Wahid" Salatiga Jl. Jendral Sudirman No. 2 Salatiga. Target peserta sejumlah 98 orang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Narasumber Bimtek Berasal dari :

- (a) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah.

- (b) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI).
- (c) Praktisi (Lembaga Kolaborasi Integritas Nasional).
- 3) Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Non Tender pada SPSE Versi 4.3 CA.

Dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019 bertempat di Lt 4 Gedung E Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No 9 Semarang. Target peserta 98 orang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Narasumber berasal dari Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah.

- 4) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Persyaratan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.

Dilaksanakan pada tanggal 26 November 2019 bertempat di Lt 4 Gedung E Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No 9 Semarang. Target peserta 36 orang PNS yang berminat mengikuti Program Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Narasumber tunggal dari LKPP-RI.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan diluar pemenuhan Perjanjian Kinerja diantaranya :

- 1) Pemenuhan Persyaratan Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menuju UKPBJ sebagai pusat unggulan pengadaan barang/jasa atau Center of Excellence (CoE) yang ditargetkan pada Tahun 2020. Untuk mencapai CoE tersebut, tingkat kematangan UKPBJ minimal pada Level 3 pada 9 Variable'

Progres pemenuhan Persyaratan tersebut sampai dengan 31 Desember 2019 sebagaimana terurai pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15.

Progres pemenuhan Persyaratan

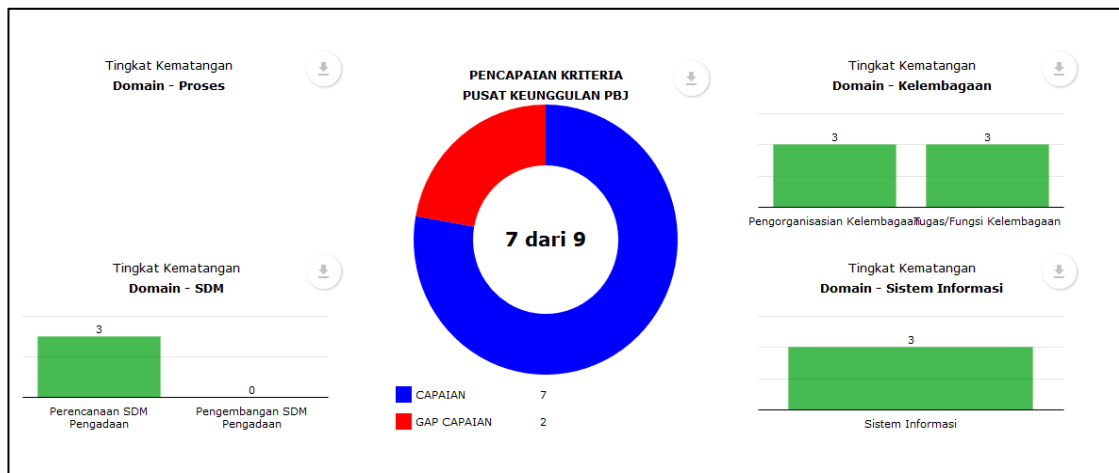
DOMAIN	VARIABLE	TARGET PEMENUHAN	KETERANGAN
PROSES	Manajemen Pengadaan	Sept '19 (B09)	Terpenuhi
	Manajemen Penyedia	Maret '20 (B15)	Terpenuhi
	Manajemen Kinerja	Juni '20 (B18)	Dalam Proses
	Manajemen Resiko	Des '19 (B12)	Terpenuhi
KELEMBAGAAN	Pengorganisasian Kelembagaan	Juni 2019	Terpenuhi
	Tugas/Fungsi Kelembagaan	Juni 2019	Terpenuhi
SDM	Perencanaan SDM	Des '19 (B12)	Terpenuhi
	Pengembangan SDM	Maret '20 (B15)	Dalam Proses
SISTEM INFORMASI	Sistem Informasi	Des '20 (B24)	Terpenuhi

Keterangan : Capaian sampai dengan 31 Des 2019 mencapai 7/9

Secara info grafis, tingkat kematangan UKPBJ Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 dapat tergambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.4.

### Dasbor Tingkat Kematangan UKPBJ Provinsi Jawa Tengah



- 2) Melakukan kegiatan fasilitasi proses Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional PPBJ.  
 Proses yang sudah dilakukan dalam rangka fasilitasi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional PPBJ adalah :
  - (a) Telah mendaftarkan Admin Instansi pada Aplikasi Sistem Informasi Penyesuaian/Inpassing JF PPBJ
  - (b) Surat Permohonan Penyesuaian/Inpassing yang ditandatangani Sekretaris Daerah Sudah di Upload pada Aplikasi Sistem Informasi Penyesuaian/Inpassing JF PPBJ.
  - (c) Masih menunggu persetujuan kebutuhan Formasi JF PPBJ yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina (LKPP-RI)
- 3) Melakukan Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional PPBJ pada Biro Administrasi PBJ Setda Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Memfasilitasi Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.  
 Pada tahun 2019, fasilitasi penilaian angka kredit terhadap JF PPBJ atas nama Eki Nia Fentika S.Sos dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY
- 5) Menyediakan Bahan penyusunan Peta Jabatan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
- 6) Menyediakan bahan Analisa Jabatan pada Biro Administrasi PBJ Setda Provinsi Jawa Tengah.  
 Analisa Jabatan yang telah disusun meliputi Jabatan Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional PPBJ dan Jabatan Pelaksana.
- 7) Menyediakan bahan rumusan standar kompetensi Jabatan pada Biro Administrasi PBJ Setda Provinsi Jawa Tengah.  
 Pada tahun 2019, Rumusan standar kompetensi yang baru disusun adalah standar kompetensi Jabatan Struktural, untuk Standar Kompetensi Jabatan Fungsional mengacu pada Standar yang telah

disusun oleh instansi pembina sedang untuk jabatan pelaksana saat ini masih dalam proses.

- 7) Melakukan input e-SAKIP Biro Administrasi PBJ Setda Provinsi Jawa Tengah.

**b) Subbagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.**

Guna pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa diantaranya :

- 1) Pembentukan Tim Advokasi.  
Terbentuknya Tim Advokasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/33 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 Juli 2019.  
Tugas Tim Layanan Advokasi adalah
  - (a) Menyusun dan mempersiapkan SOP Manajemen Resiko (mengakomodir berbagai jenis resiko seperti resiko hukum, tender gagal, keterlambatan penyelesaian pekerjaan)
  - (b) Menyusun dan mempersiapkan Standar pengelolaan Resiko Layanan pengadaan secara elektronik.
  - (c) Menyusun dan mempersiapkan Kode Etik Pengelola UKPBJ.
  - (d) Memberikan Konsultasi kepada Pejabat/Pelaksana dari Organisasi Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas membidangi Pengadaan Barang/Jasa.
  - (e) Melakukan pendampingan terhadap Pejabat/Pelaksana dari Organisasi Perangkat Daerah, yang sedang menghadapi permasalahan hukum;
  - (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung Program Advokasi Pengadaan barang/Jasa; dan
  - (g) Melaporkan hasilnya pelaksanaan tugas dalam huruf a sampai dengan huruf f, secara periodik setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Penyusunan Kode Etik, SOP Manajemen Risiko dan Dokumen Mitigasi Risiko.
  - (a) Terbentuknya Kode Etik ASN khusus untuk Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 060/0025550/2019 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Nopember 2019.  
Maksud ditetapkannya Kode Etik adalah
    - (1) Sebagai pedoman perilaku bagi Personel Biro APBJ dalam menjalankan profesi.
    - (2) Bagi atasan Personel Biro APBJ dalam mengevaluasi perilaku Personel Biro APBJ.



Tujuan ditetapkan Kode Etik adalah

- (1) Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Personel Biro APBJ dengan bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Personel Biro APBJ bersikap obyektif dan tidak memihak pada salah satu kepentingan guna menghindari adanya konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik yang jumlah anggotanya ganjil. Jabatan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagai berikut :

- (1) Ketua Majelis dijabat oleh Asisten Administrasi;
  - (2) Sekretaris dijabat oleh Kepala Biro Organisasi;
  - (3) Anggota dijabat oleh Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah dan Kepala Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro APBJ.
- (b) Pengesahan SOP Pengelolaan Risiko Pengadaan Barang/Jasa Nomor 067/0025871/2019 Tanggal 11 November 2019.
- (c) Membuat Dokumen Mitigasi Risiko berisi tentang penanganan permasalahan pengadaan barang/jasa.
- 3) Fasilitasi Pelaporan Korsupgah dan Stranas PK.
- (a) Persentase Korsupgah mencapai 100% pada tahun 2019.
    - (1) UKPBJ Independen
      - (1) Laporan atas pelaksanaan fungsi perencanaan PBJ kepada Gubernur.
      - (2) Laporan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta evaluasinya terhadap pengadaan yang dilaksanakan kepada Gubernur.
    - (2) Pelaksanaan Tupoksi
      - (1) Data yang menunjukkan sinkronisasi SSH & ASB dengan HPS.
      - (2) Laporan Hasil Review terhadap jumlah, volume, dan HPS sebelum dilaksanakan lelang atas 10 proyek terbesar termasuk infrastruktur dan konstruksi.
      - (3) Laporan/Rekomendasi UKPBJ atas reuiu pemaketan (analisis atas pemaketan).
      - (4) Rekapitulasi Pelaksanaan pengecekan kualifikasi vendor pada kegiatan PBJ (baik secara administrasi maupun fisik).
      - (5) Laporan/Berita Acara Pengecekan Kualifikasi Vendor.
    - (3) Pokja Mandiri
      - (1) SK Kada tentang Penetapan Anggota Pokja UKPBJ.
      - (2) Data Anggota Pokja saat ini (termasuk data sertifikasi).
    - (4) Perangkat Pendukung
      - (1) SK Kada/Perkada tentang Kode Etik PBJ yang memuat sanksi.

- (2) SK Kada/Perkada tentang Konflik Kepentingan dalam PBJ (bias masuk dalam Kode Etik yang mencakup Konflik Kepentingan).
- (3) SK Kada/Perkada tentang Insentif Pokja UKPBJ.
- (5) Penayangan SIRUP
  - (1) Screenshot aplikasi SIRUP yang menunjukkan telah terintegrasi dengan penganggaran APBD.
  - (2) Narasi bagan integrasi.
- (b) Persentase Stranas PK mencapai 91,6% pada tahun 2019.

Tabel 3.16.

**HASIL VERIFIKASI STRANAS PK PEMPROV JATENG S/D PERIODE B12 TAHUN 2019**

PERIODE PELAPORAN	TARGET TRIWULAN	NILAI VERIFIKASI	CATATAN VERIFIKATOR
B03	Tersedianya hasil analisis belanja (spend analysis) terhadap dokumen keuangan	100	Sesuai dengan data dukung. Catatan: perlu mempercepat pencapaian target stranas pk.
B06	Penyampaian hasil analisa supply side untuk mengetahui ketersediaan pasar terhadap kebutuhan pengadaan yang diprioritaskan untuk konsolidasi TA 2019	100	Sesuai dengan data dukung. Catatan: hanya saja untuk pengadaan ambulance disarankan di konsolidasi jadi hanya satu atau dua paket. Dari data yang dikirim masih paket-paket biasa belum konsolidasi.
B09	Tersusunnya rencana umum pengadaan yang telah terkonsolidasi untuk tahun anggaran 2020	100	Sesuai dengan data dukung. Catatan: hanya saja untuk dinas kesehatan, mestinya banyak paket sesuai dengan core bisnisnya seperti alat kesehatan dan obat-obatan.
B09	Pemprov Jawa Tengah telah menayangkan produk pada e-katalog dan sudah memberikan pelayanan e-purchasing	100	Sesuai dengan target dan data dukung. Catatan: hanya perlu diperbanyak item untuk katalog seperti ATK, makan minum dll yang sering dibutuhkan
B12	Terlaksananya proses konsolidasi dalam rangka pemilihan penyedia	100	Sesuai dengan data dukung. Catatan: perlu dilakukan pelaporan sesuai dengan target triwulanannya.
B12	Terlaksananya proses Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing JF PBJ di Pemerintah Provinsi	50	Catatan: karena masih dalam proses inpassing

- 4) Sosialisasi dan Advokasi Kegiatan Konsolidasi PBJ.
  - (a) Rapat Koordinasi Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.  
 Dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Maret 2019 bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.2, Salatiga. Dengan target peserta sebanyak 98 orang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Narasumber Bimtek Berasal dari :
    - (1) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
    - (2) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

- (3) Polda Jawa Tengah.
- (b) Rapat Koordinasi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019 Dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.2, Salatiga. Dengan target peserta sebanyak 98 orang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Narasumber Bimtek Berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 5) Penanganan Konsultasi, Aduan/Sanggah dan Pendampingan Permasalahan Hukum (termasuk Sanksi Daftar Hitam) Yang Difasilitasi.
- (a) Penanganan Konsultasi.
- (1) Melaksanakan Pembinaan Advokasi PBJ di RSJD Surakarta pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan tujuan untuk memberikan konsultasi hukum terhadap paket pekerjaan di RSJD Surakarta Tahun 2019, mengingat adanya paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Kesehatan – Biaya Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 Lantai Tahap II TA 2018 dengan pagu anggaran Rp. 23.217.500.000,- mengalami gagal kontral karena PT. Pilar Cadas Putra selaku pemenang tender melakukan pelanggaran Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf g yaitu Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa. Ditetapkan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA RSJD SURAKARTA Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah No : 188/2765.1/02/2019, masa berlaku sanksi tanggal 19 Feb 2019 s.d. 19 Feb 2020 (terlampir). Mengenai Jaminan uang muka, pihak asuransi sudah menyelesaikan dan sudah disetorkan di kas daerah.
- (2) Melaksanakan Pembinaan Advokasi PBJ di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tanggal 11 s.d. 12 September 2019 dengan tujuan untuk memberikan konsultasi hukum terhadap paket pekerjaan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, mengingat adanya paket Belanja Modal Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran Rp. 48.000.000.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal 28 Maret s.d. 22 November 2018, dengan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 tanpa dikenakan denda, dan perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 dengan pengenaan denda sehingga dinyatakan terlambat selama 23 (dua puluh tiga) hari kalender. Sesuai ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) PT. Pilar Cadas Putra dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 900.127.586,-. Untuk selanjutnya denda

keterlambatan sebesar Rp. 900.127.586,- disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

(b) Aduan/Sanggah Paket Pekerjaan TA 2019

Tabel 3.17.

Sanggah Paket Pekerjaan TA 2019

No	Nama Paket	SKPD
1	BELANJA CAP KAB TEMANGGUNG	Dinas Pu Bina Marga Dan Cipta Karya
2	CAP Untuk Jalan Kabupaten Boyolali	Dinas Pu Bina Marga Dan Cipta Karya
3	CAP Untuk Jalan Kabupaten Karanganyar	Dinas Pu Bina Marga Dan Cipta Karya
4	Pengadaan Mesin Perajang Tembakau	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
5	Fasilitasi Peralatan Pendukung Mutu dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
6	Promosi pariwisata mancanegara Penyelenggaraan Event Borobudur Art Festival A.	Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata
7	Pentas Seni Jawa Tengah Tahun 2019	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
8	Opening Closing ASG XI 2019	Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata
9	Belanja Penyelenggaraan Pesta Rakyat	Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata
10	Pengadaan Seragam OSIS (Baju+Bedge; Celana/Rok; Topi; Dasi; Ikat Pinggang) Kelas 10/11/12; Seragam Pramuka (Baju+Bedge; Celana/Rok; Topi; Hasduk; Ikat Pinggang) Kelas 10/11/12; Seragam Identitas Siswa Boarding Kelas 10; Seragam Dinas Lapangan Kelas 10; Wearpack Kelas 10/11/12; Sepatu Safety Dan Kaos Kaki Hitam) Kelas 10/11/12; Sepatu Fantovel Dan Kaos Kaki Hitam) Kelas 10/11/12 SMK Boarding Jawa Tengah di Semarang, Pati, dan Purbalingga	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
11	Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud - Sistem Informasi Manajemen (Sim) Rs	RSJD Surakarta
12	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) Ruas Jl. Selo - Blabak - Muntilan - Klagon (bts DIY) - Borobudur - Salaman	Dinas Perhubungan
13	Peningkatan Jalan A. Yani ( Kota Surakarta )	Dinas Pu Bina Marga Dan Cipta Karya
14	Peningkatan Jalan Kebonagung-Bts. Kab. Batang (Kab. Pekalongan)	Dinas Pu Bina Marga Dan Cipta Karya
15	Penggantian Jembatan Polaga ((bantربولang-kesesi/bts.kab. pekalongan) (kab. pemalang)	Dinas Pu Bina Marga Dan Cipta Karya
16	Penggantian Jembatan Kesesi (bantربولang-kesesi/bts.kab. pekalongan) (kab. pemalang)	Dinas Pu Bina Marga Dan Cipta Karya
17	Peningkatan Jalan Banyuputih - Plantungan Bts. Kab. Kendal ( Kab. Batang )	Dinas Pu Bina Marga Dan Cipta Karya
18	Peningkatan Jalan Batang - Wonotunggal - Surjo (Kab. Batang)	Dinas Pu Bina Marga Dan Cipta Karya
19	Pekerjaan Konstruksi Ruang Kelas Baru Paket 5 (Lima) Pembangunan Gedung Kantor ( 1 Paket (Pembangunan Ruang Kelas Baru))	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

20	Pengadaan Jasa Konsumsi bagi Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS di Islamic Centre Semarang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
----	---	---

(c) Pendampingan Permasalahan Hukum

- (1) Permintaan Keterangan dan Dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk menindak lanjuti Laporan Informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktik SMK, Pengadaan Personal Komputer untuk Pemenuhan Alat Lab TIK SMK Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK TA 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng terhadap Pokja Pemilihan 5 pada tanggal 23 Juli 2019.
- (2) Permintaan Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk menindak lanjuti Laporan Informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktik SMK Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng terhadap Tenaga Ahli pada tanggal 27 Agustus 2019.
- (3) Permintaan Keterangan dan Dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk menindak lanjuti Laporan Informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Kesehatan – Biaya Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (lima) Lantai Tahap II RSJD Surakarta TA 2018 terhadap Pokja 1 pada tanggal 10 Desember 2019.

(d) Sanksi Daftar Hitam

- (1) Klarifikasi permohonan sanksi daftar hitam atas CV. Ragil Jaya sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Sapi Bakalan Tahun Anggaran 2019 dengan pagu Rp. 600.000.000,- harga pemenang Rp. 584.000.000,- pada tanggal 20 September 2019 di Inspektorat Prov. Jateng, dengan hasil klarifikasi sebagai berikut :
  - (a) Pada Tanggal 30 Agustus 2019 PPKOM telah mengajukan usulan kepada PA untuk mengusulkan CV. Ragil Jaya untuk dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini disebabkan CV. Ragil Jaya sebagai pemenang tender menyatakan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan selama 14 (empat belas) hari kalender setelah diterbitkannya SPPBJ.
  - (b) Pada tanggal 6 September 2019 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jateng selaku KPA mengirim

surat permohonan rekomendasi sanksi daftar hitam kepada Inspektorat Prov. Jateng.

- (2) Klarifikasi Permohonan Sanksi Daftar Hitam Atas CV. Wahana Pembangunan sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium (HPLC) TA 2019 dengan pagu Rp. Rp 750.000.000,- harga pemenang Rp. 748.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2020 di Inspektorat Prov. Jateng, dengan hasil klarifikasi sebagai berikut :

PPKom menyampaikan bahwa telah dilakukan pemutusan kontrak paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Uji Obat Hewan dan Pakan Sidomulyo (DAK) HPLC Tahun Anggaran 2019, berdasarkan :

  - (a) Ketentuan dokumen kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), B.5.43.1 huruf a s/d e.
  - (b) Sampai batas akhir pelaksanaan kontak tanggal 1 November 2019 penyedia jasa belum menyelesaikan pekerjaan (tidak ada proses pengiriman sama sekali=0%).
- 3) Klarifikasi Permohonan Sanksi Daftar Hitam Atas PT. Ina Hasta Mandiri sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Kutoarjo-Ketawang (Kab. Purworejo) TA 2019 dengan pagu Rp. Rp 15.114.532.000,- harga pemenang Rp. 11.562.201.000,- pada tanggal 11 November 2019 di Inspektorat Prov. Jateng, dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:

PPKom menyampaikan bahwa telah dilakukan pemutusan kontrak paket pekerjaan Peningkatan Jalan Kutoarjo-Ketawang (Kab.Purworejo) TA 2019 berdasarkan :

  - (a) Ketentuan dokumen kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), pasal 41.1 huruf e.
  - (b) Surat peringatan kontrak kritis berturut-turut 3 (tiga) kali, sesuai hasil rapat pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) tahap pertama, kedua dan ketiga.
  - (c) Kendala manajemen Penyedia yang muncul sejak awal pelaksanaan kontrak hingga berakhirnya rapat pembuktian (SCM) ketiga yang berdampak pada hambatan serius pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- 4) Pembahasan Status Pemenang Tender Paket Pekerjaan Renovasi Fasilitas Lapangan Tennis Outdoor dan Tribun Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan pagu Rp. Rp 4.700.000.000,00- harga pemenang Rp. 4.256.438.756,10,- pada tanggal 13 Agustus 2019 di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng, dengan hasil klarifikasi yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menerbitkan surat pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPKom, selanjutnya berkirim surat ke Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah untuk

melakukan klarifikasi mengenai kesanggupan Pemenang Cadangan ke-I dan Pemenang Cadangan ke-II untuk bisa menjadi pemenang tender yang baru.

**c) Subbagian Tata Usaha Biro.**

Guna pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian Tata Usaha Biro diantaranya :

1. Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-.
2. Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-.
3. Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 580.000.000,-.

**C. REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2019 masih berada pada Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah Tahun 2019 pada Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah dengan kegiatan Peningkatan dan Pengembangan ULP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Didukung dengan anggaran awal sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), pada bulan September 2019 terjadi perubahan anggaran pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang menyebabkan berubah pula anggaran yang berada Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah dengan kegiatan Peningkatan dan pengembangan ULP Pemrov Jawa Tengah menjadi Rp. 6.108.805.000,- (enam milyar seratus delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah), anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, secara ringkas komposisi penggunaannya sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 14.000.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 6.094.805.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18.  
Realisasi Anggaran

Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum, dan pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan ULP Provinsi Jawa Tengah	6.108.805.000,-	5.466.342.877,-	89,48



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019, dalam rangka mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan, sebagaimana dalam table berikut :

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Biro APBJ Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi tata kerja pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa	1) Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah, 2) Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah, 3) Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah, 4) Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah, dan 5) Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah.
		Optimalisasi pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa	
		Peningkatan kapasitas SDM, pembinaan kelembagaan, dan advokasi pengadaan barang/jasa	

Pada tahun 2019 telah merumuskan Indikator Kegiatan Dan Target Kinerja Sasaran, sebagai dalam table berikut :

Tabel 4.2.

Indikator Kegiatan Dan Target Kinerja Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Sasaran	
			2019	2020
Meningkatkan Efektivitas Manajemen pemerintahan Daerah	Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelengraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemilihan penyedia Katalog Elektronik Lokal pada 4 (empat) komoditas barang/jasa di lingkungan Provinsi Jawa Tengah	100%	100%
		Tercapainya Standarisasi Harga Barang/Jasa Tahun 2021	-	100%
		Prosentase Ketepatan Pemaketan dan Penjadwalan	100%	100%
		Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%
		Prosentase Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Yang Berjalan Optimal dalam Menunjang	100%	100%

		Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		
		Prosentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput data SIMONTEPRA sesuai kaedah	-	71%
		Prosentase Efektivitas Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	70%	73%
		Prosentase Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Yang Berjalan Optimal	100%	100%
		Prosentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Yang Berjalan Sesuai SOP	100%	100%
		Prosentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang Disosialisasikan	100%	100%
		Optimalisasi Kinerja Tim Advokasi	100%	100%
		Penyusunan Kode Etik, SOP Manajemen Risiko dan Dokumen Mitigasi Risiko	100%	100%
		Fasilitasi Pelaporan Korsupgah dan Stranas PK	100%	100%
		Sosialisasi dan Advokasi Kegiatan Konsolidasi PBJ serta Kode Etik	100%	100%
		Prosentase Penanganan Konsultasi, Aduan/Sanggah dan Pendampingan Permasalahan Hukum (termasuk Sanksi Daftar Hitam) yang Difasilitasi	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum, dan pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Biro Adminstrasi Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%
		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%

2. Upaya - upaya yang dilakukan untuk dapat memenuhi Target Kinerja Sasaran, yaitu :

- a) Subbagian Pengkajian Dan Standarisasi Pengadaan.
  - 1) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Kebijakan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Jawa Tengah.
  - 2) Kegiatan Standarisasi Harga dan Biaya pada Tahun Anggaran 2019 masih melekat pada Biro Umum dikarenakan DPA Tahun 2019 sudah di anggarkan oleh Biro Umum dimana Biro Adm. Pengadaan Barang/Jasa sesuai Pergub 70 Tahun 2018 tanggal 5 November 2019. Biro Adm. Pengadaan Barang/Jasa ikut terlibat dalam penyusunan SHB sebagai Tim/Panitia Penyusunan Standarisasi Harga dan Biaya Tahun 2019.
  - 3) Kegiatan Analisis Standar Biaya (ASB) telah dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dan Biro Adm. Pengadaan Barang/Jasa telah di ikutsertakan sebagai Tim Penyusun ASB Tahun 2019.

4. Pemilihan Penyedia Jasa Katalog Elektronik Lokal komoditas Aspal Buton (CPHMA).
  5. Melakukan kegiatan proses pemilihan penyedia jasa Katalog Elektronik Lokal.
- b) Subbagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1) Melaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019.
  - 2) Melaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020.
  - 3) Bersama-sama dengan Biro Administrasi Pembangunan Daerah melakukan Desk Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dengan sasaran 49 SKPD.
  - 4) Melakukan Monitoring dan Evaluasi dengan cara Permohonan penyampaian data proses pengadaan Barang/Jasa dari masing-masing SKPD untuk dianalisa kesesuaiannya dengan RUP yang ada pada Aplikasi SPSE.
  - 5) Melakukan Desk Pemaketan dan Konsolidasi pada tanggal 23 dan 26 Desember 2019
- c) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1) Melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa bersama dengan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  - 2) Fasilitasi Pokja Pemilihan untuk melakukan reuiu dokumen persiapan pengadaan (KAK/Spesifikasi Teknis, Gambar, HPS dan Rancangan Kontrak) dari PPK.
  - 3) Fasilitasi Pokja Pemilihan untuk melakukan pemberian penjelasan secara online melalui aplikasi SPSE.
  - 4) Fasilitasi Pokja Pemilihan untuk melakukan klasifikasi lapangan bagi calon pemenang tender/seleksi/penunjukan langsung.
  - 5) Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa.
  - 6) Menyusun evaluasi dan laporan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- d) Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa.
- 1) Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Standarisasi LPSE 2014 dengan Fokus Pada Standarisasi Sistem Keamanan Informasi.
  - 2) Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Standarisasi Sistem Keamanan Informasi dalam Rangka Percepatan Standarisasi LPSE Tahun 2014 bagi LSPE Kab/Kota eks Bakorwil I dan III.
  - 3) Menyelenggarakan Acara Launching dan Bimbingan Teknis SILALAPBAJA.

- 4) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa TA 2019 dan Persiapan Menuju TA 2020.
- e) Subbagian Pengelolaan LPSE.
- 1) Pelaksanaan Bimtek Aplikasi SIRUP versi 2.3 dan aplikasi SPSE ver 4.3 CA dan e-Pengadaan Langsung bagi PPKom dan Pejabat Pengadaan di lingkungan SKPD Provinsi Jawa .
  - 2) Bimbingan Teknis aplikasi SPSE ver 4.3 CA dan sosialisasi penginputan SIKAP untuk Penyedia di Ruang Training LPSE Biro APBJ Setda Provinsi Jawa.
  - 3) Bimbingan Teknis aplikasi SPSE ver 4.3 CA untuk Pokja Pemilihan di Ruang Training LPSE Biro APBJ Setda Provinsi Jawa.
  - 4) FGD Standarisasi Layanan LPSE : 2014 untuk LPSE se eks Bakorwil II.
  - 5) Bimbingan Teknis perencanaan dan penginputan SIRUP untuk PPKom dan admin RUP Versi 2.3.
  - 6) Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) LPSE Jawa Tengah Tahun 2019.
  - 7) Workshop Peningkatan Kapasitas LPSE di Regional.
  - 8) Rakornas LPSE Provinsi se Indonesia di LPSE Provinsi Sulawesi Utara Manado tema “Era Baru LPSE Provinsi untuk Indonesia Maju”.
  - 9) Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh LKPP di Balai Sidang Convention Center Jakarta Tema “Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju”.
- f) Subbagian Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 1) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakor UKPBJ) Kabupaten Kota se Jawa Tengah.
  - 2) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kontrak Konsolidasi Dan Kontrak tahun Jamak Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
  - 3) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Non Tender pada SPSE Versi 4.3 CA.
  - 4) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Persyaratan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.
  - 5) Pemenuhan Persyaratan Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ Provinsi Jawa Tengah.
  - 6) Melakukan kegiatan fasilitasi proses Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional PPBJ
  - 7) Melakukan Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional PPBJ pada Biro Administrasi PBJ Setda Provinsi Jawa Tengah.
  - 8) Memfasilitasi Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
  - 9) Menyediakan Bahan penyusunan Peta Jabatan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.

- 10) Menyediakan bahan Analisa Jabatan pada Biro Administrasi PBJ Setda Provinsi Jawa Tengah.
  - 11) Menyediakan bahan rumusan standar kompetensi Jabatan pada Biro Administrasi PBJ Setda Provinsi Jawa Tengah.
  - 12) Melakukan input e-SAKIP Biro Administrasi PBJ Setda Provinsi Jawa Tengah.
- g) Subbagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- 1) Pembentukan Tim Advokasi.
  - 2) Penyusunan Kode Etik, SOP Manajemen Risiko dan Dokumen Mitigasi Risiko.
  - 3) Fasilitasi Pelaporan Korsupgah dan Stranas PK.
  - 4) Sosialisasi dan Advokasi Kegiatan Konsolidasi PBJ.
  - 5) Penanganan Konsultasi, Aduan/Sanggah dan Pendampingan Permasalahan Hukum (termasuk Sanksi Daftar Hitam) Yang Difasilitasi.
- h) Subbagian Tata Usaha Biro
- 1) Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah selama 12 bulan.
  - 2) Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro selama 12 bulan.
  - 3) Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah selama 12 bulan .

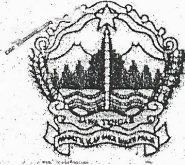
## **B. SARAN DAN MASUKAN**

Laporan Tahun 2019 ini merupakan penyampaian hasil capaian kinerja Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah yang pertama kali di dokumentasikan dalam bentuk tertulis. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang perlu di tingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Perlunya peningkatan pola komunikasi dan sinergi dari semua ASN di Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah.
2. Perlunya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas.

Semoga laporan tahun 2019 ini dapat menjadikan bahan atau landasan dalam menetapkan dan meningkatkan kualitas kinerja Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266  
Semarang 50243

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. YUNI ASTUTI, MA

Jabatan : Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Semarang, 2019

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

  
Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP  
Pembina Utama  
NIP. 19600229 198603 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PENGADAAN BARANG/JASA

  
Ir. YUNI ASTUTI, MA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620621 198709 2 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020  
 BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA  
 SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO. (1)	TUJUAN/ SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)			TARGET (4)
	<b>Tujuan</b>				
	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Daerah	Capaian Kinerja Perangkat		81 %
	<b>Sasaran</b>				
	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Jasa	Pelayanan Pengadaan Barang/		63 %

Semarang, 2019

Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa  
 Setda Provinsi Jawa Tengah



Ir. YUNIASTUTI, MA  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19620621 198709 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

NO. (1)	TUJUAN / SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
<b>Tujuan</b>			
	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80 %
<b>Sasaran</b>			
	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	60 %

**Program**

- |  |                     |                 |                   |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah                                 | Rp. 7.350.000.000,- | <b>Anggaran</b> | <b>Keterangan</b> |
| 2. Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 650.000.000,-   |                 | APBD              |


Semarang, 2019  
Pihak Pertama

Pihak Kedua

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. Ir. SRI PURYONO KS. MP  
Pembina Utama  
NIP. 19600229 198603 1 004

  
Ir. YUNI ASTUTI, MA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620621 198709 2 001